

BAB V KESIMPULAN

Usaha-usaha pemerintah untuk mengatasi krisis perekonomian di Indonesia akan menghadapi tantangan-tantangan yang berat. Jika boleh dikatakan akan sangat sulit dicapai dalam waktu yang singkat. Usaha-usaha penanggulangannya terkendala dengan situasi-situasi politik yang terjadi didalam negeri seperti, pertama adanya konflik antara lembaga eksekutif (Presiden) dengan lembaga legislatif (DPR-RI), yang akhirnya menimbulkan krisis konstitusi dan ketegangan politik di masyarakat luas. Kedua, Instabilitas keamanan antara lain akibat adanya konflik bernuansa sara di Ambon/ Maluku, Poso dan Sampit., adanya gerakan separatisme GAM dan OPM serta meningkatnya perbuatan kriminalitas yang makin sadis. Hal ini sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Ketiga, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme adalah penyebab utama timbulnya krisis ekonomi yang berkepanjangan, keempat, tidak kompaknya tim ekonomi yang dibentuk oleh Presiden Abdurahman Wahid.

Tanda-tanda kegagalan dan keterpurukan perekonomian Indonesia pemerintahan Abdurrahman Wahid terlihat dengan adanya:

1. Defisit APBN 2001 menurut versi Pemerintah sebesar 3,7 % atau Rp. 53,8 triliun dari Produk Domestik Bruto (PDB). Padahal APBN 2001 sampai dengan bulan April 2001 baru berjalan 4 bulan.
2. Total hutang luar negeri telah melebihi 100 % total Produk Domestik Bruto (PDB)

3. Jatuhnya nilai tukar rupiah terhadap US dollar akhir bulan April 2001 hampir mencapai US \$ 1 = Rp. 12.000,-.
4. Daya beli rakyat menurun, pengangguran mendekati 40 juta orang, lebih 82 juta orang hidup dibawah garis kemiskinan, indeks harga saham gabungan (IHSG) jatuh dari 677 (Januari 2000) menjadi 416 (Desember 2000), pemulihan ekonomi tidak fokus dan visi pemerintah tidak jelas, program pemulihan ekonomi hanya slogan dan tidak menyentuh rakyat bawah, Presiden sumber ketegangan.
5. Memburuknya hubungan dengan lembaga keuangan internasional (IMF) dan negara-negara donatur lainnya yang disebabkan tidak kompaknya tim ekonomi yang dibentuk Presiden serta situasi politik yang terjadi di dalam negeri

Pada situasi keadaan negara yang multi krisis seperti inilah, pada tanggal 30 April 2001 DPR-RI mengeluarkan memorandum II kepada Presiden RI sebagai berikut :

- Pertama : Menyatakan Presiden dalam waktu tiga bulan tidak memperhatikan memorandum I DPR yang telah disampaikan 1 Februari 2001.
- Kedua : Menyampaikan memorandum II kepada Presiden sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat 3 Tap MPR No. 3/1978 sebagai kelanjutan memorandum I DPR tertanggal 1 Februari 2001 yang menganggap Presiden sungguh melanggar haluan negara yaitu:
- a. Melanggar UUD 1945 Pasal 9 soal sumpah jabatan
 - b. Melanggar Tap. MPR. No. XI/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN.
- Ketiga : Memberikan waktu satu bulan kepada Presiden untuk mengindahkan Memorandum II sebagaimana dimaksud dalam butir No. 2 .

Jatuhnya Memorandum II tidaklah semata-mata karena masalah Buloggate dan Bruneigate. Masalah Buloggate dan Bruneigate hanyalah sebagai pemicu saja. Dikeluarkannya Memorandum II juga tidak lepas dari perilaku Presiden yang

sering memberikan pernyataan-pernyataan yang kontroversial dan inkonsistensi. Presiden Abdurrahman Wahid juga dinilai kurang mempunyai *sense of crisis* seperti sering bepergian ke luar negeri sedangkan situasi di dalam negeri tidak kondusif seperti adanya konflik etnis di Sampit baru-baru ini.

Memorandum I dan memorandum II disepakati DPR dengan semangat yang sama, yaitu hilangnya kepercayaan yang sangat signifikan terhadap Gus Dur. Presiden Wahid dalam tempo tiga bulan terakhir tidak berhasil meraup simpati dan dukungan dari fraksi lain kecuali dari F-KB, basis politiknya. Fraksi TNI/Polri yang kemarin abstain, tidak bisa dinilai mendukung atau menentang. Seluruh proses dan dinamika politik selama pemerintahan Presiden Wahid hanya bergerak dalam spectrum yang amat sempit. Yaitu mempertahankan atau kehilangan kekuasaan. Parlemen muncul sebagai lembaga yang galak, sedangkan eksekutif terpojok pada posisi defensif. Karena itu, Pemerintahan Gus Dur kehilangan motivasi untuk mengatasi krisis, yang justru menjadi kebutuhan utama rakyat. Gus Dur lalu dengan sadar-sadar-sadarnya mengerahkan seluruh energi untuk menjaga kekuasaan, paling tidak sampai tahun 2004.